BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dari pembangunan nasional, tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Keberhasilan pembangunan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional diselenggarakan berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu. Puskesmas merupakan garda depan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar. Puskesmas yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas adalah tercapainya Kecamatan Sehat menuju terwujudnya Indonesia Sehat. Kecamatan sehat adalah gambaran masyarakat kecamatan masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan, yakni masyarakat yang hidup dalam lingkungan dan dengan

perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Indikator kecamatan sehat adalah lingkungan sehat, perilaku sehat, cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu, serta derajat kesehatan penduduk kecamatan. Untuk mendukung kecamatan sehat salah satu upaya yang dikembangkan saat ini adalah dengan adanya Desa Siaga, yang salah satu indikatornya adalah ada Pos Kesehatan Desa sebagai Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), dengan penggerakan masyarakat wilayah desa/kelurahan, dan sebagai upaya Pertolongan Pertama Pada Penyakit (P3P) dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).

Agar Puskesmas dapat menjalankan fungsinya secara optimal perlu dikelola dengan baik, baik kinerja pelayanan, proses pelayanan, maupun sumber daya yang digunakan. Masyarakat menghendaki pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, serta dapat menjawab kebutuhan mereka, oleh karena itu upaya peningkatan mutu, manajemen risiko dan keselamatan pasien perlu diterapkan dalam pengelolaan Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif kepada masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat dan swasta. Penilaian keberhasilan Puskesmas dapat dilakukan oleh internal organisasi Puskesmas itu sendiri, yaitu dengan Penilaian Kinerja Puskesmas yang mencakup manajemen sumber daya termasuk alat, obat, keuangan dan tenaga, serta didukung dengan manajemen sistem pencatatan dan pelaporan, disebut Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS). Untuk menjamin bahwa perbaikan mutu,

peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan di Puskesmas, maka perlu dilakukan penilaian oleh pihak eksternal dengan menggunakan standar yang ditetapkan yaitu melalui mekanisme akreditasi. Puskesmas wajib untuk diakreditasi secara berkala paling sedikit tiga tahun sekali, demikian juga akreditasi merupakan salah satu persyaratan kredensial sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS.

Tujuan utama akreditasi Puskesmas adalah untuk pembinaan peningkatan mutu, kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan program, serta penerapan manajemen risiko, dan bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi. Pendekatan yang dipakai dalam akreditasi Puskesmas adalah keselamatan dan hak pasien dan keluarga, dengan tetap memperhatikan hak petugas. Prinsip ini ditegakkan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan keselamatan pelayanan.

Selain itu, prinsip dan dasar yang ditetapkan dalam Sistem Kesehatan Nasional yang menggarisbawahi soal hak asasi manusia dan responsif gender, juga dipakai dalam standar akreditasi Puskesmas ini untuk menjamin bahwa semua pasien mendapatkan pelayanan dan informasi yang sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasien, tanpa memandang golongan sosial, ekonomi, pendidikan, jenis kelamin, ras, maupun suku.

Akreditasi Puskesmas menilai tiga kelompok pelayanan di Puskesmas, yaitu:

I. Kelompok Administrasi Manajemen, yang diuraikan dalam:
   1) Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)
   2) Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)
   3) Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)

II. Kelompok Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), yang diuraikan dalam:
   1) Upaya Kesehatan Masyarakat yang Berorientasi Sasaran (UKMBS)
   2) Kepemimpinan dan Manajemen Upaya Kesehatan Masyarakat (KMUKM)
   3) Sasaran Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat

III. Kelompok Upaya Kesehatan Perorangan, yang diuraikan dalam:
   1) Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP)
   2) Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK)
   3) Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien (PMKP)

Cara penilaian tiap pembuktian pada elemen diberikan nilai:

a. 0 =Jika belum ada sama sekali atau baru sebahagian kecil ada (0% – 24%)
b. 5 = Jika sebagian besar sudah dilaksanakan (25 – 79 %)
c. 10 = Jika sudah dilaksanakan (80 – 100 %)

Penetapan status Akreditasi Puskesmas terdiri atas:

a. Tidak terakreditasi
   Jika pencapaian nilai pada kelompok I, II, dan III kurang dari 75 % dan Kelompok IV, V, VI, VII, VIII, IX kurang dari 20 %
b. Terakreditasi dasar
   Jika pencapaian nilai Kelompok I, II, dan III ≥ 75 %, dan kelompok IV, V, VI, VII, VIII, IX ≥ 20 %
c. Terakreditasi madya
   Jika pencapaian nilai Kelompok I, II, III, IV, V ≥ 75 %, Kelompok VI, VII, VIII, IX ≥ 20%
d. Terakreditasi utama
   Jika pencapaian nilai Kelompok I, II, III, IV, V, VI, VII ≥ 75 %, Kelompok VIII, IX ≥ 20%
e. Terakreditasi paripurna
   Jika pencapaian nilai semua Kelompok ≥ 75 %

Sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 mengenai program Pembangunan Nasional (PROPENAS), maka perlu disusun Indek Kepuasan Masyarakat sebagai suatu tolak ukur untuk dapat menilai tingkat kualitas pelayanan. Selain itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu untuk dilakukan perbaikan dan mendorong

semua unit pelayanan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanannya. Capaian IKM untuk puskesmas Masamba pada tahun 2020 yaitu 80.41667 dengan Baik, berdasarkan hasil survey yang dilakukan untuk mencari tingkat kepuasan masyarakat pada tahun 2020.

Sebuah tantangan bagi Kabupaten Luwu Utara terlebih lagi dengan adanya pendemi Covid 19 pada tahun 2020 yang memberikan implikasi yang besar bagi dunia kesehatan khususnya di Kabupaten Luwu Utara. Dinas Kesehatan pada Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPT) Puskesmas Masamba dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas dan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat.

Secara internal organisasi jumlah pegawai yang ada di Kantor Puskesmas Masamba memiliki pegawai yang berjumlah 64 orang, terdiri dari 63 orang tenaga medis dan 1 orang tenaga non medis. Jumlah sumber daya manusia yang ada sudah cukup menjadi kekuatan atau motor penggerak dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat.

Berikut ini tabel jumlah tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Masamba sebagai berikut:

TABEL 1

JUMLAH PEGAWAI DI PUSKESMAS MASAMBA TAHUN 2020

No.	Tenaga Medis	Jumlah
1.	Analis	1 orang
2.	Kesmas	2 orang
3.	Gizi	3 orang
4.	Farmasi	1 orang
5.	Perawat	17 orang
6.	Bidan	26 orang
7.	Dokter Gigi	1 orang
8.	Dokter Umum	3 orang
	Total	64 orang

Sumber : Profil Puskesmas Masamba Tahun 2020

Jumlah ini cukup memadai bagi pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Masamba. Selanjutnya Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2020 telah berupaya dalam melaksanakan kewajibannya yang salah satunya adalah upaya pencapaian akreditasi UPT Puskesmas yang ada di Kabupaten Luwu Utara.

Berikut ini data yang diperoleh pada DInas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara mengenai persentase Puskesmas yang telah melakukan akreditasi di tahun 2020 sebanyak 87,5% atau sekitar 14 puskesmas, dalam bentuk Tabel sebagai berikut :

TABEL 2
AKREDITASI PUSKESMAS DI KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2020

No.	Puskesmas	Tahun Survei	Status Penilaian
1	Sabbang	2016 & 2018	Akreditasi Madya
2	Sukamaju	2016 & 2018	Akreditasi Madya
3	Baebunta	2016 & 2018	Akreditasi Utama
4	Masamba	2016 & 2018	Akreditasi Utama
5	Cendana Putih	2016 & 2018	Akreditasi Utama
6	Malangke Barat	2016 & 2018	Akreditasi Madya
7	Malangke	2017	Akreditasi Madya
8	Bone-bone	2017	Akreditasi Madya
9	Tanlili	2017	Akreditasi Madya
10	Wonokerto	2018	Akreditasi Madya
11	Limbong	2018	Akreditasi Madya
12	Seko	2018	Akreditasi Madya
13	Lara	2019	Akreditasi Madya
14	Rampi	2019	Akreditasi Madya

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Utara, 2020

Dari data yang ada menunjukkan bahwa 14 UPT Puskesmas di Luwu Utara telah terakreditas dengan rincian 3 UPT dengan tingkat Akreditasi Utama dan 11 UPT Puskesmas dengan tingkat Akreditasi Madya. Sebagai salah satu arah kebijakan peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas, pengembangan dan penerapan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah perlu dilakukan. Dengan terakreditasinya 14 Puskesmas yang ada di Luwu Utara, dapat memberikan pengaruh terhadap mutu pelayanan kesehatan yang memadai kepada masyarakat, terutama bagi UPT Puskesmas yang telah menerima status akreditasi pada tingkat Akreditasi Utama seperti UPT Puskesmas Baebunta, Masamba dan Cendana Putih.

Akreditasi puskesmas dilakukan sebagai suatu cara untuk dapat meningkatkan mutu atau kualitas dari pelayanan selain dilaksankaannya akreditasi terdapat hal lain yang perlu diperhatikan lagi adalah adanya peran Sumber Daya Manusia yang ada di Puskesmas sebagai motor penggerak pelaksanaan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, diantaranya yaitu tim medis, tenaga kesehatan dan beberapa tenaga pendukung. Puskesmas pada umumnya telah melaksanakan manajemen internal yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi atas berbagai kegiatan di Puskesmas baik aspek administrasi manajemen. Peneliti mencatat data kunjungan masyarakat di Puskesmas Masamba pada Tahun 2020 yaitu:

a) Kunjungan JKN sebanyak: 21718
b) Kunjungan Umum sebanyak: 12375.

Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) maupun Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Namun sayangnya manakala akan dilakukan penilaialan akreditasi, Puskesmas disibukan dengan menyusun berbagai dokumen yang menjadi prasyarat, bukti dan telusur berbagai elemen penilaian secara dadakan dan terkesan kejar tayang, padahal sejatinya sebagian dokumen tersebut merupakan bagian dari rutinitas dan kegiatan yang telah dilaksanakaan di Puskesmas.

Kendala yang dihadapi adalah saat semua berkas harus dapat dikumpulkan dengan batas waktu yang pendek, cukup menghabiskan energy dan waktu, terlebih lagi jika hal ini tidak didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi cukup dan tidak memiliki skill yang baik. Akreditasi dilakukan sebagai sebuah bentuk penilaian yang diberikan oleh pihak eksternal untuk menilai kualitas sebuah institusi. Selanjutnya setelah kegiatan akreditasi selesai dilaksanakan tidak ada pula monitoring evaluasi selanjutnya secara internal institusi. Alasan inilah yang membuat peneliti merasa tertarik untuk dapat melakukan sebuah penelitian secara mendalam.

Sehingga berdasarkan penjelasan pada latar belakang maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian Tesis dengan judul: “Analisis Persiapan Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas Masamba Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.” Peneliti memilih untuk melaksanakan penelitian di Puskesmas Masamba yaitu salah satu Puskesmas yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Selanjutnya hasil karya yang dapat di berikan dari penelitian ini disajikan dalam bentuk Buku Pedoman Pelaksanaan Akreditasi Bagi Puskesmas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan tersebut maka rumusan masalah pada penelitin ini adalah : Bagaimana pelaksanaan akreditasi Puskesmas Masamba Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis Persiapan Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas terhadap Manajemen Pelayanan di Puskesmas Masamba Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

D. Manfaat penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini berguna untuk dapat memberikan konstribusi bagi khasanah keilmuan tentang Analisis Persiapan Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas Terhadap Manajemen Puskesmas Masamba kabupaten Luwu Utara.

b. Manfaat Praktis

- Diharapkan dampat memberikan dampak positif bagi penyelenggara pelayanan pubiik dalam memberikan pelayanan prima dalam sektor kesehatan. Sehingga dapat menumbuhkan tingka kepercayaan dan kepuasan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik.
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi Puskesmas Masamba untuk dapat meningkatkan lagi kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

- Diharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian lainnya dikemudian hari.